



BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROV NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 telah diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja tahun 2024 ini diucapkan terima kasih.

Kupang, 10 Januari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,



Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004271990031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran renja SKPD	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Perubahan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	20
2.2	Pencapaian Kinerja Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	25
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	33
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur .	38
3.1	Prioritas dan Sasaran Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Biro Perekonomian Dan administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	41
3.2	Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Biro Perekonomian Dan administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	42
4.1	Sasaran dan Program Biro PerekonomianDan Adminstrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	43
4.2	Rekapitulasi Program ,Kegiatan ,Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	45
4.3	Rumusan Rencana kerja program dan Kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dan Perkiraan Maju Tahun 2025	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (RENJA) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode satu tahun yang memuat arah kebijakan, program/kegiatan dan sumber pembiayaan/pendanaan mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, RENJA mempunyai peran strategis mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang secara substantial menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan acuan untuk memasukkan usulan program/kegiatan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan biro untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka tahapan penyusunan sampai dengan penetapan RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti tata cara dan alur penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya (2022) dan mengacu RKPD tahun berkenaan (2024);
2. Program/kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program/kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah pada tahun berkenaan (2024);
3. Program/kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program/kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan;
4. Program/kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
3. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
4. Instruksi Mendagri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Intansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rankangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program/kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Tahun 2024. Diharapkan melalui Rencana Kerja ini prinsip efektivitas dan efisiensi dapat berjalan dengan optimal.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Administrasi Pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Administrasi Pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan berisikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Bab V Penutup memuat uraian penutup yang berisikan catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan

Rencana belanja daerah untuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah perubahan APBD sebesar **Rp.1.116.684.280,-** direalisasi sebesar **Rp.867.758.530,-** atau **77,71%** dari rencana yang ditetapkan. Seluruh belanja daerah di jabarkan ke dalam 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program ini menjalankan 4 (Empat) kegiatan rutin untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** direalisasi sebesar Rp. **396.645.500,-** atau **89,80%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.441.685.840,-** Dengan realisasi fisik dan capaian indikator per-kegiatan sebagai berikut ;

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar **Rp.14.801.400,-** atau **31,08%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.47.616.400,-** dengan hasil yang di capai :

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar **Rp.198.970.880,-** atau **96.08%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.207.090.600,-** dengan hasil yang dicapai :

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tersediaanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya penyediaan bahan/material

Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu

Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- 1.3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan sebesar **Rp.36.977.430,-** atau **99,19%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.37.278.000,-** dengan hasil yang dicapai :

Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin Lainnya

- 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan sebesar **Rp. 93.575.740,-** atau **96,82%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.96.648.040,-** dengan hasil yang dicapai ;

Tersedianya jasa surat menyurat

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor

- 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasikan sebesar **Rp.52.520.050,-** atau **99,00%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.53.052.800,-** dengan hasil yang dicapai :

Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Capaian dari Program ini yaitu : Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan BUMD/BLUD. Program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : Adapun 3 (tiga) kegiatan yang di laksanakan dalam program Perekonomian dan Pembangunan yaitu : Program Perekonomian dan Pembangunan direalisasikan sebesar **Rp.386.388.490,-** atau **67,18%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.574.998.700,-** dengan realisasi fisik dan capaian indikator per-kegiatan;

- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian direalisasikan sebesar **Rp.204.002.300,-** atau **62,77%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.324.999.900,-** dengan hasil yang dicapai ;

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro Mikro

- 2.2 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam direalisasikan sebesar **Rp.46.157.800,-** atau **61,54%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.74.999.720,-** dengan hasil yang dicapai ;

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air

- 2.3 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD direalisasikan sebesar **Rp.136.228.390,-** atau **77,85%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.174.999.080,-** dengan hasil yang dicapai :

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD, Jasa Keuangan dan aneka usaha

Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

3. Program kebijakan Administrasi Pembangunan

Adapun 2 (dua) kegiatan yang di laksanakan dalam program Kebijakan Administrasi Pembangunan yaitu : Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan direalisasikan sebesar **Rp.84.724.600,-** atau **84,72%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.99.999.740,-** dengan realisasi fisik dan capaian indikator per-kegiatan terdiri dari :

3.1 Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasikan sebesar **Rp.58.838.700,-** atau **84,06%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.69.999.740,-** dengan hasil yang dicapai :

Terlaksananya kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD

Terlaksananya kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN

Terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah

3.2 Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah direalisasikan sebesar **Rp.25.885.900,-** atau **86,29%** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.30.000.000,-** dengan hasil yang dicapai :

Terlaksananya pelaporan pembangunan daerah

Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran perencanaan tahunan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dan Pencapaian Perubahan Renja Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan	
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										
4	01 01									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terciptanya tata kelola pelayanan pimpinan dan layanan administrasi yang efektif dan efisien								
4	01 01 1 01									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

4	01	01	1	01.0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	7	7	7	100%	100%	12	17142.86%
4	01	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Jumlah Paket, Laporan dan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah								
4	01	01	1	06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1 paket	100%
4	01	01	1	06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 dokumen	100%
4	01	01	1	06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1 paket	100%
4	01	01	1	06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 laporan	100%
4	01	01	1	06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 laporan	100%
4	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah								
4	01	01	1	08.0001	penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 laporan	100%

4	01	01	1	08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 laporan	100%
4	01	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuinjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya jumlah Pemeliharaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
4	01	01	1	09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	1 unit	100%
4	01	01	1	09.0006	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	100%	10 unit	100%
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan kebijakan Substansi Perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik yaitu kebijakan Ekonomi (Makro,Mikro dan SDA)								
4	01	06	1	01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik								

4	01	06	1	01.0001	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2	6	3	6	200	2	14	700
4	01	06	1	01.0002	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1	1	1	1	100	1	3	300
4	01	06	1	02	Pengelolaan Kebijakan Dan Koorsdinasi SDA	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik								
4	01	06	1	02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1	2	2	2	100%	1	5	500
4	01	06	1	02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	2	2	2	100	1	5	500
4	01	06	1	03	Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik								
4	01	06	1	03.0003	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	2	2	2	100	2	6	300

4	01	06	1	03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2	2	2	2	100	2	6	300
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Peningkatan Kinerja Administrasi Pembangunan								
4	01	08	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah								
4	01	08			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1	4	2	4	200	1	9	900
4	01	08	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1	3	2	3	150	1	7	700
4	01	08	1	01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1	2	2	2	100	1	5	500
4	01	08	1	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
4	01	08	1	02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	13	2	3	150	1	7	700

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan unit kerja pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru dibentuk pada Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 yang selanjut di ubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan ;
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka indikator pengukuran kinerja capaian sasaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Persentase kebijakan Substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Kebijakan Ekonomi Makro- Mikro dan SDA);
2. Cakupan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik dan,
3. Persentase Perangkat Daerah tertib administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah .

Memperhatikan data realisasi keuangan dan fisik program-kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pencapaian Kinerja Biro dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Nilai Target IKU, SPM, IKK	Target Renstra PD Tahun 2024-2026			RealisasiCapaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2022	2023	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		100%	100%	100%	82,80%	84,24%	100%	
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		100%	100%	100%	90,08	79,56	100%	
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan		100%	100%	100%	73,48	95,15	100%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		100%	100%	100%	88,90	97,91	100%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		100%	100%	100%	73,21	100	100%	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		100%	100%	100%	66,39	90,76	100%	

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai isu-isu penting dan strategis dalam penyelenggaran tugas dan fungsi, yaitu :

**1. PENGELOLAAN DAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN
(EKONOMI MAKRO DAN MIKRO)**

4 ISU PERMASALAHAN :

Belum Optimalnya Pelayanan Komunikasi Efektif Yaitu Rapat Koordinasi , Teknis,HLM dan FGD dan FGD Tingkat Daerah terkait pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di 22 Kab/kota

Belum Optimalnya Pelayanan Penyaluran BBM di Daerah terutama melalui pelayanan SPBU Daerah Terpencil

Belum Optimalnya Sosialisasi Penyaluran dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat yang Tepat Sasaran

Belum Otimalnya Monitoring Dan Evaluasi Pada Ekonomi – Makro Terkait Penyaluran BBM , Pengendalian Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi dan – Ekonomi Makro Terkait Penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi Serta Pemanfaatan SIKP

**2. BAGIAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA
(SDA)**

2 ISU PERMASALAHAN

Masih Rendahnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Sumber Daya Alam Unggulan

Masih Rendahnya Pemanfaatan Potensi SDA Energi Dan Air

Belum Optimalnya Pengelolaan Konservasi SDA dan Perlindungan Sumber Daya Hati

3. BAGIAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN KOORDINASI BLUD

5 ISU PERMASALAHAN :

Khusus Bidang Kesehatan, Terkait Kelembagaan dan Pola Tata Kelola RSUD Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus sejalan Dengan Dikeluarkannya PP Nomor 72. Tahun 2019

Layanan BLUD Sebagai Bagian Retirbusi Daerah Sehubungan dengan Keluarnya PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD) Sebagai Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

Pengelolaan SDM BLUD Sehubungan Dengan Diterbitkannya Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah BLUD (SIPD/e- BLUD)

Pelaksanaan Flektibilitas dan Tata Kelola BLUD Serta Penguatan Tusi Biro/Bagian Perekonomian Prov. Kab/Kota

4. **BAGIAN PENGELOLAAN DAN KEBIJAKAN KOORDINASI BUMD**

4 ISU PERMASALAHAN :

Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembinaan Pada BUMD Karena SDM yang memahami Akusisi Perusahaan(Mengevaluasi Laporan Keuangan Perusahaan) Pada Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan Sangat Terbatas

Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Terkait Tarif Minum di Kab/Kota Karena Keterbatasan SDM Yang Memiliki Keahlian Dalam Menghitung Tarif Air Minum Batas Atas dan Batas Bawah

Kolaborasi dan Sinergi Antar perangkat Daerah Terkait Dukungan Kepada BUMD Belum Optimal.

Dengan menetapkan isu-isu, maka Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat menentukan tantangan dan peluang yang akan dihadapi guna memecahkan isu-isu strategis tersebut.

a. Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi dalam melaksanakan tugas pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT antara lain adalah :

1. Kurangnya tenaga profesional untuk melakukan perencanaan pengembangan ekonomi daerah;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Masih Terbatasnya sumber dana untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan dan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparat melalui pendidikan non formal;
4. Program yang berkaitan erat belum saling mendukung untuk pengembangan ekonomi daerah;
5. Tersebarinya potensi ekonomi yang belum tergarap dan sulit untuk dijangkau karena secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan serta minimnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi ekonomi daerah;
6. Data base masih belum akurat, valid dan reliable;
7. Sistem Pertanahan yang belum mendukung kegiatan investasi;
8. Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta pihak swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi dan pembangunan belum terciptanya kemitraan yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha/swasta;
9. Perkembangan komoditi yang belum berorientasi pasar dan masalah kualitas produksi serta kontinuitas produksi;
10. Terbatasnya kualitas aparaturnya maupun masyarakat yang diakaitkan dengan pengembangan teknologi produksi;
11. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi rakyat (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan lembaga ekonomi daerah lainnya);
12. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap sector permodalan, dan;
13. Sistem pengendalian dan monev administrasi pembangunan yang belum memadai dan terintegrasi.

Beberapa peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT antara lain adalah:

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung berupa: Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah;

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing;
3. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bagian dan Sub Bagian dalam Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
4. Tersedianya potensi sumber daya alam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata, sector jasa dan perdagangan potensi investasi yang belum dikembangkan secara optimal;
5. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
6. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
7. Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.

5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Mencermati realisasi, tingkat ketercapaian indikator kinerja, kondisi keuangan daerah, kondisi makro ekonomi, dan tantangan berbagai bidang, maka dilakukan reviu terhadap RKPD tahun 2024 yang dituangkan dalam Hasil Analisis Kebutuhan sebagaimana tabel 2.3 berikut:

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu indikatif	Penambahan
			2024	2024				2024	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Tata Kelola Administrasi dan Pelayanan Pimpinan yang Efektif dan Efesien	100%	386.854.719		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Cakupan Layanan Tata Kelola Administrasi dan Pelayanan Pimpinan yang Efektif dan Efesien	100%	385.079.640	-
	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	100%	27.139.679		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	100%	27.139.000	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	100%	183.898.727		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	100%	183.568.000	-
	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dihasilkan	100%	101.316.313		Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dihasilkan	100%	100.585.040	-
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	74.500.00		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	73.787.600	-

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja 2024	Usulan Pagu 2024	No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja 2024	Pagu indikatif 2024	Penambahan 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
	PENGELOLAAN KOORDINASI KEBIJAKAKN PEREKONOMIAN	Persentase kebijakan Substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan Baik (Kebijakan Ekonomi Makro – Mikro)	100%	259.000.000		PENGELOLAAN KOORDINASI KEBIJAKAKN PEREKONOMIAN	Persentase kebijakan Substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan Baik (Kebijakan Ekonomi Makro – Mikro)	100%	408.000.000	-
	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Rekomendasi Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro	100%	234.000.000		Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Rekomendasi Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro	100%	382.900.000	-
	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Rekomendasi Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	100%	25.000.000		Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Rekomendasi Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	100%	25.100.000	-
	PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Koordinasi,Sinkronisasi, Dan Evsaluasi Kebijakan SDA yang terkonsolidasi dengan Baik	100%	110.000.000		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Koordinasi,Sinkronisasi, Dan Evsaluasi Kebijakan SDA yang terkonsolidasi dengan Baik	100%	109.100.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pertanian,Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pertanian, Kelautan dan Perikanan	100%	70.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pertanian,Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pertanian, Kelautan dan Perikanan	100%	69.100.000	-
	Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	100%	40.000.000		Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	100%	40.000.000	-

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja 2024	Usulan Pagu 2024	No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja 2024	Pagu indikatif 2024	Penambahan 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
	PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD	Cakupan Pembinaan koordinasi, Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100%	190.000.000		PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD	Cakupan Pembinaan koordinasi, Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100%	245.500.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan pembinaan dan Kebijakan Pendirian BUMD	100%	105.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan pembinaan dan Kebijakan Pendirian BUMD	100%	156.000.000	200.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan pembinaan dan Kebijakan Pendirian BLUD	100%	85.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan pembinaan dan Kebijakan Pendirian BLUD	100%	86.500.000	-

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	2024	Target Kinerja	Usulan Pagu	No	Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu indikatif	Penambahan
			2024	2024				2024	2024	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
3	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
	PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Perangkat Daerah Tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah	100%	164.360.321		PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Perangkat Daerah Tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah	100%	213.735.424	-
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendaloian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBD	100%	50.000.000		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendaloian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBD	100%	99.000.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Laporan Hasil Pengendaloian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBD	100%	39.360.321		Koordinasi, Sinkronisasi dan Monev kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Laporan Hasil Pengendaloian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBD	100%	39.660.000	-
	Pengendalian Adminstrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	50.000.000		Pengendalian Adminstrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	48.500.000	-
	PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Perangkat Daerah Tertib Administrasi Pembangunan Daerah	100%	25.000.000		PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Perangkat Daerah Tertib Administrasi Pembangunan Daerah	100%	26.575.424	-
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporaan Hasil Pelaksanan Pembangunan Daerah	100%	25.000.000		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporaan Hasil Pelaksanan Pembangunan Daerah	100%	26.575.424	-

6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.

**TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTT**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2024 adalah:

- a. Menyusun Rencana Program dan kegiatan Tahun 2024.
- b. Menetapkan Program dan volume Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- c. Memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Melalui Rencana Kerja ini, Biro Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Program dan Kegiatan pada tahun 2024 untuk mendukung tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah serta hukum yang akuntabel dan berbasis sistem teknologi informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tujuan yang ditetapkan mengacu pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dalam kurun waktu 2024-2026, yaitu **“Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan akuntabel kompeten, harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif”**.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dalam kurun waktu 2024-2026 dengan fokus utama Tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Adminstrasi Pembangunan
2. Meningkatkan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD dan Adminstrasi Pembangunan
3. Meningkatkan Kualitas tata kelola adminstrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN) Dalam Rangka mewujudkan Pembangunan yang tertib, cepat dan tepat .

2.2.2. Sasaran Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan Biro Perekonomian dan Pembangunan yang dimaksud, maka rumusan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan Tahun 2024-2026 adalah :

Tujuan Pertama Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Adminstrasi Pembangunan memiliki satu sasaran yaitu ; Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam . Sedangkan Tujuan Kedua, Meningkatkan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD dan Adminstrasi Pembangunan dengan memiliki satu sasaran yaitu ; Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen dan Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kualitas tata kelola adminstrasi Pembangunan Daerah (APBD) dan Administrasi Pembangunan Wilayah (APBN) Dalam Rangka mewujudkan Pembangunan yang tertib, cepat dan tepat dengan memiliki satu sasaran ; Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administasi pembangunan yang tertib. Adapaun perumusan tujuan dan sasaran Renja Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan Setda Prov. NTT Tahun 2024 beserta targetnya dituangkan dalam tabel 3.1 Berikut :

Prioritas dan Sasaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Adminstrasi Pembangunan	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan Substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan (Kebijakan Ekonomi Makro, Mikro, SDA)	%	100%
Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD dan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen	Cakupan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota Yang Terkonsolidasi fdengan Baik	%	100%
Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pembangunan daerah (APBD) dan administrasi pembangunan wilayah (APBN), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tertib, cepat dan tepat	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administasi pembangunan yang tertib	Persentase perangkat Daerah Tertib Administrasi Pembangunan Wilayah	%	100%

Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ,
dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	IKU	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja IKU	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase kebijakan Substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan (Kebijakan Ekonomi Makro, Mikro, SDA)	100%	Biro Perekonomian Dan Admininstrasi Pembangunan
2	Meningkatnya pembinaan, Monitoring, Evaluasi Tatakelola BUMD dan BLUD Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Dan Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dan Penerimaan PAD Berupa Deviden	Cakupan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota Yang Terkonsolidasi fdengan Baik	100%	Biro Perekonomian Dan Admininstrasi Pembangunan
3	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah Dan Pembangunan Wilayah Dalkam Rangk Terciptanya Penataan Administrasi Pembangunan Yang Tertib	Persentase perangkat Daerah Tertib Administrasi Pembangunan Wilayah	100%	Biro Perekonomian Dan Admininstrasi Pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Biro Perkonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menentukan Program serta Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target kinerja dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Perkonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 dapat disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Program / Kegiatan

Biro Perkonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Terciptanya tata kelola pelayanan pimpinan dan layanan administrasi yang efektif dan efisien	<p style="text-align: center;">PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI</p> <p style="text-align: center;">Perencanaan, Penganggaran dan Ervaluasi Kinerja perangkat Daerah</p> <p>Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD</p> <p style="text-align: center;">Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Penyediaan Bahan/Material</p> <p>Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p style="text-align: center;">Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>penyediaan Jasa Surat menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor</p> <p style="text-align: center;">Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya</p>
2	Terlaksananya koordinasi penyusunan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perkonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan	<p style="text-align: center;">PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Perkonomian</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Kebijakan Dan Koorsdinasi SDA</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Kebijakan dan Koorsdinasi BUMD dan BLUD</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</p>

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
3	Terlaksananya peningkatan kualitas tata kelola administrasi pembangunan daerah (APBD) dan administrasi pembangunan wilayah (APBN), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tertib, cepat dan tepat.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pelaporan Pelaksanaan Pemsangunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan yang disusun Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket	
1.	Reformasi Birokrasi	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTT	1.358.415.064		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI	385.079.640.-		
		Perencanaan, Penganggaran dan Ervaluasi Kinerja perangkat Daerah			
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	27,139,000.00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	45,000,000.00		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000.00		
		Penyediaan Bahan/Material	48,894,000.00		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	45,000,000.00		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,074,000.00		

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	penyediaan Jasa Surat menyurat	1,310,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	99,275,016.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	56,997,600.00	
	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	16.790.000	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	759,600,000.00	
	Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro	382,900,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro	25,100,000.00	
	Pengelolaan Kebijakan Dan Koorsdinasi SDA		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	69.100,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40,000,000.00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koorsdinasi BUMD dan BLUD		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	156.000.000.-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pendirian BLUD	86.500,000.00	

3	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	213.735.424.-	
	Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99,000,000.00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.660,000.00	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	48.500,000.00	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	26,575,424.00	

Rumusan rencana program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025															
Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
					BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							1.358.415.064			1.460.215.040
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terciptanya tata kelola pelayanan pimpinan dan layanan administrasi yang efektif dan efisien	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	449.284.540	PAD		100%	449.284.540		
4	01	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran dan Ervaluasi Kinerja perangkat Daerah			100%	27.139.000	PAD		100%	84.998.500		
4	01	01	1	01.0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	27.139.000	PAD		100%	69.998.800		
4	01	01	1	01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	-	PAD		100%	10.000.000		

4	01	01	1	01.0010	Penyelenggaraan Wali Data pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Wali Data pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	-	PAD		100%	4.999.700
4	01	01	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%		PAD		100%	29.625.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100%	-	PAD		100%	29.625.000
4	01	01	1	05.0009									
4	01	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				183.568.000	PAD		100%	183,894,000.00
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	45.600.000	PAD		100%	25.110.440
4	01	01	1	06.0005									
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	5.000.000	PAD		100%	4.800.000
4	01	01	1	06.0006									
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	48.894.000	PAD		100%	29.967.200
4	01	01	1	06.0007									
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	45.000.000	PAD		100%	37.988.000
4	01	01	1	06.0008									
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	39.074.000	PAD		100%	85.981.000
4	01	01	1	06.0009									
4	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.585.040	PAD		100%	101.716.540

4	01	01	1	08.0001	penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	1.310.000	PAD		100%	1.301.500
4	01	01	1	08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	99.275.040	PAD		100%	120.695.040
4	01	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				73.787.600	PAD		100%	29.294.200
4	01	01	1	09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	56.997.600	PAD		100%	21.994.200
4	01	01	1	09.0006	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota kupang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	100%	16.790.000	PAD		100%	7.300.000
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan kebijakan Substansi Perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik yaitu kebijakan Ekonomi (Makro, Mikro dan SDA)		100%	759.600.000	PAD		100%	822.097.100
4	01	06	1	01	Pengelolaan kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik		100%	408.000.000	PAD		100%	424.997.400
4	01	06	1	01.0001	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	382.900.000	PAD		100%	399.998.800

4	01	06	1	01.0002	Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	25.100.000	PAD		100%	24.998.600
4	01	06	1	02	Pengelolaan Kebijakan Dan Koorsdinasi SDA	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik		100%	109.100.000	PAD		100%	117.100.500
4	01	06	1	02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	69.100.000	PAD		100%	57.100.800
4	01	06	1	02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	40.000.000	PAD		100%	59.999.700
4	01	06	1	03	Pengelolaan Kebijakan dan Koorsdinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik		100%	242.500.000	PAD		100%	238.999.200
4	01	06	1	03.0003	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	156.000.000	PAD		100%	149.999.500.
4	01	06	1	03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	86.500.000	PAD		100%	89.000.000
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Peningkatan Kinerja Administrasi Pembangunan		100%	213.735.424	PAD		100%	239.357.460

4	01	08	1	01	Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah		100%	213.735.424	PAD		100%	189.358.100
4	01	08	1	01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	99.000.000	PAD		100%	99.999.500
4	01	08	1	01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	39.660.000	PAD		100%	39.359.600
4	01	08	1	01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	48.500.000	PAD		100%	49.999.000
4	01	08	1	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		100%	26.575.424	PAD		100%	49.999.360
4	01	08	1	02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel /Desa	100%	26.575.424	PAD		100%	49.999.360

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2024 disusun untuk memberikan fokus dan arah kebijakan dalam mengembangkan fungsi dari 3 (tiga) Program pokok beserta 10 kegiatan yang telah di jalankan oleh 3 (tiga) Bagian dalam berbagai kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan telah menghasilkan berbagai output berupa Rekomendasi, Laporan dan Naskah akademik. Selain itu menjalankan berbagai kegiatan dan fasilitasi yang menjadi tanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Kegiatan Perekonomian dan Koordinasi Pembangunan meliputi Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Kegiatan Administrasi Pembangunan meliputi Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah (APBD dan APBN) serta Pelaporan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari Rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, untuk menjadi bahan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya

Kupang, 10 Januari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



s. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004271990031005